

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya Cetakan II*, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso dan Ali Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dcuur-dusar Ilmu Hukum Normutif sebugui Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT. Grafitri, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
- Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Elsam, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000.

Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Cv Sinar Baru, Bandung, 1984.

Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, Makalah, MAPPI FH UI, Jakarta, 2002.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008

## **B. Sumber Lain**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 amandemen ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

A.M Mujahidin, MH, Rubrik Pembinaan Akhlak dan Kepemimpinan : *Good Governance* Suatu Langkah Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa Dalam Sistem Peradilan Satu Atap di Indonesia, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 269 Tahun ke XXIII (IKAHI, April 2008).

Dina Zenita (Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch), *Praktek Perlindungan Saksi di Jerman* , [www.anllkorupsi.org](http://www.anllkorupsi.org).

Gerald E. Caiden, “Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya”, <http://rudycr.com/>, 10 Januari 2013.

Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Mereka*”, makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002.

Indriyanto Seno Adji, Urgensi Perlindungan Saksi, 9 Desember 2005, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

Koalisi Perlindungan Saksi, Bersama Rakyat Membasmi Korupsi, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)1.

Kompas, Politik dan Hukum : *Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah*, 5 April 2007.

Kompas, Artikel : Fenomena *Whistleblower* dan Pemberantasan Korupsi, Achmad Zainal Arifin

Mahmud Mulyadi, *Membangun Paradigma Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*, Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana Program S2 Ilmu Hukum SPS USU T.A 2007/2008.

Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*.

Marsono, Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak.Pidana Korupsi, [http://dprdsukoharjokab.go.id/news\\_detail.php?id=38](http://dprdsukoharjokab.go.id/news_detail.php?id=38)

Pendampingan korban : Hakim terlalu berkutat pada KUHAP oleh Yanti

Gunarsih, [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com).

Romli Atmasasmita (*Ketua Forum 2004*), *Artikel : Perlindungan Saksi dalam perkara Korupsi*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

Tempo, Opini : *Merindukan Gerald Shur*, 10 Januari 2013, hlm 22.

Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum (Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini ?)*, Jakarta : Kompas.

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Observasi Awal oleh Indonesia Corruption Watch*.

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

[www.Detik.com](http://www.Detik.com)